

RUU TENTANG JABATAN HAKIM

AKD: RUU TENTANG JABATAN HAKIM

Bulan: September 2020

Oleh:

GAMBAR

# **PERPUSTAKAAN DPR RI**

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: [perpustakaan@dpr.go.id](mailto:perpustakaan@dpr.go.id)

Web: [perpustakaan.dpr.go.id](http://perpustakaan.dpr.go.id)

**Komisi III Usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020**

Kompas.com - 30/06/2020, 17:58 WIB

Penulis Tsarina Maharani, Editor Kristian Erdianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan dan RUU tentang Jabatan Hakim masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Hal tersebut disampaikan pimpinan Komisi III dalam rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR. "Ada dua usulan baru yang masuk dari Komisi III, yaitu usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim. Kalau bisa," kata Wakil Ketua Baleg, Willy Aditya, saat dihubungi, Selasa (30/6/2020).

Sementara itu, saat ini ada dua RUU yang semestinya dibahas Komisi III bersama pemerintah, yaitu RUU KUHP dan RUU Pemyarakatan (PAS). Namun, kedua RUU yang merupakan inisiatif pemerintah itu belum kunjung dibahas. Diketahui, RUU KUHP dan RUU PAS berstatus carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya. "Dua RUU ini usul pemerintah, besok akan ditanyakan khusus untuk KUHP dan PAS kepada pemerintah," ucap Willy.

Evaluasi Prolegnas Prioritas ini sesuai dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan UU PPP, Prolegnas dapat dievaluasi tiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas tahunan. Evaluasi dilakukan dengan mengeluarkan atau menambahkan RUU dalam daftar prolegnas. Willy menjelaskan, RUU yang diusulkan dihapus adalah rancangan yang belum dibahas atau tidak akan dibahas hingga Oktober 2020.

Ia mengatakan, RUU yang telah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 nantinya dapat diusulkan kembali untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021. Berbagai usulan-usulan dalam rapat hari ini akan dibahas dalam rapat kerja bersama pemerintah pada Kamis (2/7/2020) mendatang. "Ini belum tripartit. Bukan di-drop ya, tapi dikomunikasikan untuk dimasukkan Prolegnas tahun berikutnya karena tidak keburu sampai Oktober kalau melihat status dan dinamika di masing-masing komisi. Keputusannya nanti di raker tripartit hari Kamis," ujarnya.

Untuk diketahui, Prolegnas Prioritas 2020 terdiri atas 50 RUU yang terdiri atas usul DPR, DPD, dan pemerintah. Berdasarkan rapat hari ini, ada sejumlah RUU inisiatif DPR yang diusulkan dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. RUU yang diusulkan dihapus yaitu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dibahas Komisi VIII serta RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan yang dibahas Komisi IV. "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di-drop. Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021," kata Willy.

Kemudian, RUU tentang Jalan yang dibahas Komisi V. Willy mengatakan, RUU tentang Jalan sebetulnya sudah mulai dibahas, tetapi kemungkinan akan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 jika tidak dapat diselesaikan hingga Oktober. "Komisi V RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jalan, RUU tentang Jalan juga. Tapi kita minta kepastian lagi, apakah ini selesai Oktober. Kalau tidak, nanti RUU tentang Jalan akan di-drop," ucapnya. Berikutnya, RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dibahas Komisi IX, RUU tentang Gerakan Pramuka yang dibahas Komisi X, dan RUU tentang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian serta RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dibahas Komisi XI. "Komisi XI, RUU Bea Materai jalan karena itu (usul) pemerintah. Kemudian dua di-drop yaitu, RUU Perpajakan dan Penguatan Perekonomian dan RUU tentang OJK," ujar Willy.

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/17584301/komisi-iii-usul-ruu-kejaksaan-dan-ruu-jabatan-hakim-masuk-prole>

<b>JENIS</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>URL</b>
Berita	Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi III DPR (RUU Jabatan Hakim Belum Dibahas, Kenapa Sampai Ada Isu Pemerasan)	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/16326">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/16326</a>
Berita	Banyak duplikasi dari undang-undang lain	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26142">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26142</a>
Berita	Batasi Usia Pensiun 'Wakil Tuhan': Komisi III Ngebut Selesaikan RUU Jabatan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/22577">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/22577</a>
Berita	Disepakati Baleg, RUU Jabatan Hakim mulai dibahas di Senayan	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25025">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25025</a>
Berita	DPR akan mensahkannya pada akhir 2016	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26140">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26140</a>
Berita	DPR Bahas RUU Jabatan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23578">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23578</a>
Berita	DPR Dukung Presiden Keluarkan Perppu Darurat Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23188">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23188</a>
Berita	DPR Geber RUU Jabatan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35359">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35359</a>
Berita	DPR Mulai Bahas RUU Jabatan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/22583">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/22583</a>
Berita	DPR Sepakat Perkuat Peran KY	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25680">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25680</a>
Berita	Evaluasi Pembinaan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25678">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25678</a>
Berita	Jabatan Hakim Agung Dibatasi Lima Tahun - Panja DPR Mulai Bahas RUU Jabatan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25934">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25934</a>
Berita	Jabatan Hakim Seumur Hidup Rawan Penyimpangan	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26323">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26323</a>
Berita	Kebut RUU Jabatan Hakim: Komisi III Jaring Masukan Dari Pengadilan Di Jabar	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35516">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35516</a>
Berita	KY menolak diperlemah	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/21971">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/21971</a>
Berita	KY Minta Tambah Kewenangan Eksekusi	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25705">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25705</a>
Berita	Legislasi: Substansi RUU Jabatan Hakim Picu Resistensi	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25807">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/25807</a>
Berita	Masa Jabatan: Uji Materi Diduga Konflik Kepentingan	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26294">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26294</a>
Berita	Panja RUU Jabatan Hakim Dibentuk	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/28788">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/28788</a>
Berita	Partai Pendukung Pemerintah Diminta Dorong Pengesahan RUU Jabatan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/36390">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/36390</a>
Berita	Pemerintah terlihat gamang, RUU Jabatan hakim sulit disahkan cepat	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35556">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35556</a>
Berita	Pemerintah-DPR Sepakat Batasi Masa Jabatan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/27636">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/27636</a>
Berita	Peradilan Rentan Intervensi	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/30413">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/30413</a>
Berita	Perbaiki MA: KY Akan Diberi Hak Eksekusi Sanksi	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23584">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23584</a>
Berita	Perjalanan RUU Jabatan Hakim yang Belum Selesai	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26648">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26648</a>
Berita	Prolegnas : KY Desak DPR Tuntaskan RUU Jabatan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/18501">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/18501</a>
Berita	RHakim: Parlemen Perkuat Pengawasan Eksternal Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23538">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23538</a>
Berita	Roda Legislasi: Anggaran Pemerintah belum siap. RUU Jabatan Hakim sulit dirampungkan	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35514">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35514</a>
Berita	Roda Legislasi: RUU Jabatan Hakim Diputus Pekan Depan	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/36360">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/36360</a>
Berita	RUU Jabatan Hakim - Pakar : Tidak Perlu Dibahas	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/22383">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/22383</a>

Berita	RUU Jabatan Hakim - Pengawasan KY demi Akuntabilitas Peradilan	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35374">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/35374</a>
Berita	RUU Jabatan Hakim Diharapkan Perkuat Aspek Integritas	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/12426">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/12426</a>
Berita	RUU Jabatan Hakim Diharapkan Untungkan Penegakkan Hukum	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23867">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23867</a>
Berita	RUU jabatan hakim. Pengawasan KY diusulkan diperkuat	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23437">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23437</a>
Berita	RUU Jabatan Hakim: Mahkamah Agung Tolak Penurunan Usia Pensiun Hakim Agung	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/21487">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/21487</a>
Berita	RUU Jabatan Hakim: manajemen kehakiman jangan dimonopoli MA	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/28643">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/28643</a>
Berita	RUU Jabatan Hakim: Pengawasan Eksternal Diperkuat	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23119">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23119</a>
Berita	RUU Jabatan Hakim: Periodisasi Jabatan Untuk Menjaga Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23441">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/23441</a>
Berita	RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Hakim Agung Jadi 67 Tahun	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/21461">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/21461</a>
Berita	Sepakat Batasi Jabatan Hakim	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/27648">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/27648</a>
Berita	UU Jabatan Hakim : KY Minta Penambahan Kewenangan	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26024">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/26024</a>